

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Implementasi kebijakan hak anak didik dapat diberi kesimpulan bahwa pada segi pelaksanaannya dilihat dari hak beribada dan hak mendapatkan pendidikan, implementor belum sepenuhnya patuh terhadap kebijakan karena SOP yang diberlakukan di LPKA tidak mencakup kebijakan yang dimuat, kemudian dari segi pengawasan pelaksanaan SOP Pembinaan ANDIKPAS, implementor belum sepenuhnya memahami apa yang menjadi tupoksi implementor dalam menjalankan kebijakan hak anak didik tersebut sehingga tupoksi dalam memfasilitasi hak anak didik belum terlaksana dengan baik.
- b) Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi hak anak didik dilihat dari aktor yang terlibat dalam implementasi, yaitu seluruh pegawai LPKA Kelas II Pekanbaru dan tidak melibatkan aktor dari luar instansi, hal ini mempermudah garis komando dalam menjalankan kebijakan, dari segi kejelasan tujuan sudah sepenuhnya di pahami oleh implementor, namun tidak dijalankan sebagaimana yang tertulis dalam SOP karena SDM di LPKA kurang, kemudian dari perkembangan dan kerumitan kebijakan keberhasilan penerapan kebijakan tidak terlepas dari peran orang tua yang

mendukung kebijakan serta penerimaan orang tua agar kedepannya anak tidak merasa dikucilkan, selanjutnya partisipasi yang diberikan oleh stakeholder yaitu Kemenkumham Riau dalam membangun sarana dan prasarana dan Dinas Perpustakaan dan Arsiparis dalam memberikan perpustakaan keliling berperan penting dalam pemberian hak anak didik, serta faktor lainnya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti ketersediaan gedung perpustakaan bagi ANDIKPAS yang perlu disediakan serta ketidak leluasaan ANDIKPAS dalam menyampaikan keluhan langsung kepada ANDIKPAS.

5.2 Rekomendasi

Agar pemenuhan hak anak didik dapat sepenuhnya terlaksana dengan baik, dibutuhkan :

1. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru : Perlu adanya peningkatan kerjasama dengan pihak/stakeholder lain terkait pemenuhan hak pendidikan, hal ini karena pendidikan anak menjadi hal yang serius untuk diperhatikan, baik itu peran dari tutor yang berperan dalam memberikan pengajaran bagi anak didik serta pemenuhan bahan bacaan.
2. Bagi Kepala Lembaga Pembinaan Kelas II Pekanbaru : perlu adanya kedekatan antara Kepala Lembaga Pembinaan Kelas II Pekanbaru dengan anak didik masyarakat, hal ini karena untuk meningkatkan keterbukaan dari anak didik dalam menemukan permasalahan yang dirasakan oleh anak didik.

3. Bagi Pemerintah Pusat. Diharapkan partisipasi dari pemerintah pusat dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh anak didik seperti pembangunan rumah ibadah, pembangunan perpustakaan, serta fasilitas untuk meningkatkan keterampilan bagi anak didik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anderson, J. E. (1977). *Public Policy-Making*. New York: Praeger Publishers
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar – Dasar Kebijkana*. Bandung. Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetak Ketiga Bandung. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Denhardt, J. V. and D. R. B. (2003). *The New Public Services: Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharepe, Inc.
- Dunn, W.N. (1994). *Public Policy Analysis : aN Introduction*. New Jersey: Pretice Hall International, Englewood Cliffs.
- Hasan, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Media Sriwijaya.
- Henry, N. (1988). *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*, Diterjemahkan oleh Luciana D.Lontoh. dari Judul Asli "Public Administration and Public Affairs". Jakarta: Rajawali Per
- Howlett, M. M. R. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles And Policy Subsystems*. New York :Oxford University Press.
- Keban, Jeremias T. (2004). *Enam Dimensi Administrasi Strategis Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito Nasution, Zulkarnain. (2009). *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*. Malang: UMM Press
- Nugroho. D. R. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implemetasi dan Evaluasi*. Jakarta : Putra Media Nusantara.
- Nugroho, D. R. (2007). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo
- Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition the Dorsey Press, Chicago-Illionis 1986.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Umar, H. (2004). *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Widodo, J. (2006). *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Bayumedia Publishing
- Winarto, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta. *Center of Academic Publishing Service*.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Alex Media Sriwijaya.
- Soetodjo, W (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono, AG. (2016). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Tahir, Arifin. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta. PT. Pustaka Indonesia Press

Jurnal :

- Aprilia, M., & Kismartini, K. (2016). Analisis Kebijakan Publik Deliberatif Dalam Pembangunan Daerah Di Kecamatan Semarang Utara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(4), 78-91
- Arifai, Z. and. (2021). Corectional Protégé Mentorship as an Effort of Resocialization in Class II Special Correctional Institution for Children of Kendari. *Journal of Legality*, 29(1).
- Arikunto. (2010). *PROSEDUR PENELITIAN*. RINEKA CIPTA.
- Bessiar, M. (2020). Proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Putussibau. *JPASDEV: Jc 167 Public Administration and Sociology of Development*, 1(1), 44-57
- Budijanto, O. W. (2017). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK THE FULFILLMENT ON THE RIGHT TO EDUCATION FOR

JUVENILE CRIMINALS IN THE JUVENILE SPECIAL CORRECTION FACILITY. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.

- Candrawati, S. D. (2018). Implementasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Pembunuhan Santri di Lamongan. *Al-Hukama'*, 8(2), 269-291.
- Carolyne, R. N. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kejadian Skabies di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Pekanbaru Tahun 2019*.
- Daud P, S. D. (2013). Implementasi Hak Anak Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Pembunuhan Santri di Lamongan. *Al-Hukama'*, 8(2), 269-291.
- Frank Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. sidney; Imam Baihaqi (Penerjemah), R. (Penyunting). (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Handbook Analisis Kebijakan Publik - Google Books*. <https://books.google.co.id/books?id=z-FIEAAQBAJ&pg=PA21&dq=teori+ripley+and+franklin+pada+implementasi+kebijakan&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwiLzKj0jur6AhUtS2wGHc1-CZwQ6AF6BAGDEAI#v=onepage&q=teori+ripley+and+franklin+pada+implementasi+kebijakan&f=false>.
- Harimurti, E. R. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Lapas Klas Ii A Salemba Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan. *Unes Journal Of Social And Economics Research*, 3(2), 243-252.
- Hutabarat, B.N. (2015). Pemenuhan Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Pembunuhan Santri di Lamongan. *Al-Hukama'*, 8(2), 269-291.
- Marlina, 2018, Digitalisasi Bank terhadap Peningkatan Layanan dan kepuasan Nasabah Bank, *Jurnal Ilmiah Inovator*, edisi maret 2018.
- Masriani, M., & Sujianto, S. (2017). *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-anak Pengemis di Kecamatan Mandau)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Masitoh, S., & Cahyani, F. (2020). PENERAPAN SISTEM AMONG DALAM PROSES PENDIDIKAN SUATU UPAYA MENGEMBANGKAN KOMPETENSI GURU. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*.

<https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v8n1.p122--141>

- Masyid. (2019). Implementation of Human Rights Protection Towards in Penitentiary of Children in Makassar. *Justice International Journal of Law*, Vol. 2 No.
- Pratiwi, et al. (2019). Management of Education Implementation System in Special Development Institue of Class II Bandar Lampung. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, Vol. III I.
- Putra, D. G. (2018). *PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG*. Universitas Andalas, Padang.
- Reeves, S., Albert, M., Kuper, A., & Hodges, B. D. (2008). Why use theories in qualitative research?. *Bmj*, 337
- Rosyda, F. S. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1), 43–56. <https://doi.org/10.37729/AMNESTI.V2I1.651>
- Sahputri, M., & As' ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 176-190
- Septiana Duwi Saputri, Z. (2019). Pelaksanaan KOnseling Individu Dalam Mengatasi Stres Pada Tahanan Anak Yang Baru Masuk Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru. *Jurnal Riset Mahasiswa Sakwah Dan Komunikasi*.
- Suyoto. (2021). The Implementation of Education and Istruction Right for Children with Criminal Law Issues who are Being Detained in Correctional Facilities and State Detention Centers. *Academic International Conference on Literacy and Novelty*, 2021.
- Tampubolon, E. lambue. (2017). EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK Di LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PEKANBARU. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(1).
- Umaidi, et al. (2021). Implementation the Family Model to Development of Children in the Correctional Institution of Children Class IIA. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(5).

Wijayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 9(3), 15-28.

Wulandari, A., Maslihah, S., & Setiadi, A. (2020). PENGUATAN ORIENTASI KARIR BIDANG OTOMOTIF ANAK DIDIK LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK. *JURNAL PSIKOLOGI INSIGHT*.
<https://doi.org/10.17509/insight.v4i1.24637>

Peraturan – Peraturan :

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 ORTA Lembaga Pembinaan Khusus Anak.